

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna laporan keuangan/pengguna aset mempunyai tugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga negara untuk tahun berikutnya dalam penyusunan rancangan APBN. Dalam rangka meningkatkan efisiensi perencanaan anggaran oleh kementerian/lembaga negara, standar biaya masukan digunakan sebagai acuan biaya satuan berupa harga satuan, tarif dan indeks untuk pembuatan biaya komponen keluaran pada saat pembuatan RKA- KL untuk tahun anggaran berjalan.

Sebagai salah satu perangkat instrumen dari penganggaran berbasis kinerja, standar biaya masukan menjadi sangat penting untuk mendukung kualitas satker RKA-KL dalam menghitung kebutuhan anggarannya dan merupakan alat reviu angka dasar yang digunakan untuk menghitung tingkat kegiatan alokasi kebutuhan belanja, output, sub-output, komponen, dan sub-komponen. Dalam Peraturan Menteri Keuangan, dikatakan bahwa standar biaya masukan merupakan salah satu komponen biaya satuan yang digunakan untuk menyusun biaya komponen output.

Dalam hal ini, penulis akan meninjau peruntukan khusus pada Standar Biaya Masukan yang ada di salah satu satker yaitu KPPN Jakarta II TA 2022 sesuai dengan PMK No.60/PMK.02/2021, karena meskipun sudah berlandaskan prinsip-prinsip yang sesuai dengan penganggaran keuangan negara yang baik, masih ada penerapan SBM yang tidak sesuai dengan peraturan tentang SBM bersangkutan, bahkan sering ditemukan adanya kesalahan dalam pengimplementasiannya, seperti tidak boleh melebihi SBU telah ditetapkan.

Sebagai salah satu satker, KPPN Jakarta II juga ikut serta dalam menerapkan SBM seperti dalam suatu pengadaan. Penerapan SBM ini menggambarkan seberapa besar tingkat efisiensi suatu satker dalam mengelola anggarannya, karena keefisienan dapat digunakan sebagai tolak ukur perbandingan antara masukan dan keluaran sehingga dapat menggambarkannya secara menyeluruh. Jadi, penulis akan membandingkan beberapa peraturan yang mengatur tentang SBM sehingga dalam penerapannya penulis akan dapat menemukan apa saja kendala yang dialami oleh satker bersangkutan dalam pengimplementasian SBM tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Seberapa besar pengaruh penerapan Standar Biaya Masukan pada KPPN Jakarta II Tahun Anggaran 2022?
- b. Apa kendala dan permasalahan dalam penerapan Standar Biaya Masukan yang terjadi di KPPN Jakarta II Tahun Anggaran 2022?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Biaya Masukan dan pengaruhnya di KPPN Jakarta II
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh satker KPPN Jakarta II dalam penerapan SBM yang sesuai dengan peraturan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu pada tinjauan atas penerapan Standar Biaya Masukan pada RKA-K/L yang digunakan oleh KPPN Jakarta II sebagai objek penelitian. Penerapan Standar Biaya Masukan untuk tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Dokumen Tugas Akhir (KTTA) ini adalah agar bisa digunakan sebagai bahan bagi para pembaca untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Biaya Masukan pada suatu satker khususnya di KPPN Jakarta II. Selain itu, tulisan ini juga bermanfaat bagi pihak satker yang bersangkutan sebagai bahan refleksi dan evaluasi untuk melakukan peningkatan dan perbaikan dalam pengelolaan satker khususnya meningkatkan efisiensi dan memperbaiki kualitas perencanaan anggaran sehingga dapat mempercepat penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERSETUJUAN DARI TIM PENILAI KARYA TULIS TUGAS
AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5 Manfaat Penulisan

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

2.2 Penganggaran Berbasis Kinerja

2.3 Standar Biaya Masukan

2.4 Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

BAB III METODE PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II

3.2.1 Sejarah dari KPPN Jakarta II

3.2.2 Visi & Misi KPPN Jakarta II

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

3.2.4 Struktur Organisasi

3.3 Pembahasan dan Hasil

3.3.1 Tinjauan penerapan Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi anggaran pada Satker KPPN Jakarta II

3.3.2 Permasalahan dalam penerapan SBM di KPPN Jakarta II

BAB IV SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

DAFTAR RIWAYAT HIDUP